

PEMETAAN DELINEASI KAWASAN PERKOTAAN BERBASIS PARTISIPATIF

Fariz Primadi Hirsan^{1*}, Agus Kurniawan², Rasyid Ridha³, Ardi Yuniarman⁴
^{1,2,3,4}Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia
fariz.primadi@gmail.com¹

ABSTRAK

Abstrak: Perkembangan kota yang dinamis selalu mengalami perubahan yang terakumulasi menjadi perubahan yang akan memberikan dampak bagi wilayah di sekitarnya. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Bima, Wawo ditetapkan sebagai PKL (Pusat kegiatan Lokal). Akan tetapi, hingga saat ini, sebagai kawasan yang ditetapkan untuk fungsi pusat kegiatan lokal, Kecamatan Wawo belum memiliki kawasan yang ditetapkan sebagai wilayah perkotaan kecamatan. Tujuan dari dilakukannya pengabdian ini adalah, bagaimana masyarakat dan pranata kelembagaan yang ada di Kecamatan Wawo, memiliki andil dalam menentukan, batasan wilayah perkotaan di kecamatannya, serta diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan dan perencanaan kawasan perkotaan di wilayahnya sendiri dimuali dengan kegiatan partisipatif pemetaan wilayah. Metode pengabdian yang dilakukan dengan pendekatan sosialisasi dan demonstrasi kegiatan terkait pemetaan partisipatif. Kegiatan dilakukan bersama dengan pemerintah wilayah Kecamatan Wawo, beserta seluruh perwakilan desa dilingkup kecamatan ini sebanyak 30 orang peserta, dan diakhir kegiatan dilakukan monitoring dan evaluasi dengan melakukan pengisian angket pemahaman kepada peserta kegiatan. Dari kegiatan pengabdian yang dilakukan, dihasilkan kesepakatan bersama terkait penyepakatan batas wilayah perkotaan dan dituangkan dalam peta delineasi wilayah perkotaan Kecamatan Wawo.

Kata Kunci: Pemetaan; Kawasan Perkotaan; Partisipatif.

Abstract: *The dynamic development of the city always experiences changes that accumulate into changes that will have an impact on the surrounding area. In the Bima Regency Spatial Plan, Wawo is designated as the Center for Local Activities. However, until now, as an area designated for the function of a local activity center, Wawo District does not yet have an area designated as a sub-district urban area. The purpose of this service is how the community and institutional institutions in Wawo District have a role in determining the boundaries of urban areas in their sub-districts and it is hoped that this activity can increase public understanding in the management and planning of urban areas in their own territory, starting with participatory regional mapping activities. The service method is carried out with a socialization approach and demonstration of activities related to participatory mapping. The activity was carried out together with the regional government of Wawo District, along with all village representatives in this sub-district as many as 30 participants, and at the end of the activity monitoring and evaluation were carried out by filling out understanding lifts to activity participants. From the service activities carried out, a mutual agreement was generated regarding the agreement on urban area boundaries and was stated in the delineation map of the urban area of Wawo District.*

Keywords: Mapping; Urban Areas; Participatory.



Article History:

Received: 25-07-2022
Revised : 06-09-2022
Accepted: 23-09-2022
Online : 15-10-2022



This is an open access article under the
CC-BY-SA license

A. LATAR BELAKANG

Kota terbentuk dari komunitas kecil yang didiami oleh sekumpulan manusia yang menetap pada suatu tempat tertentu. Komunitas ini yang terus berkembang, yang semakin lama semakin meningkat baik penduduk maupun aktivitas yang ada di dalamnya (Makkelo, 2017). Perkembangan kota yang dinamis yang selalu mengalami perubahan setiap waktu yang dalam jangka waktu tertentu yang terakumulasi menjadi perubahan yang signifikan diukur pada waktu tertentu akan memberikan dampak bagi wilayah di sekitarnya (Fariz Primadi, 2019). Kondisi saat ini kawasan perkotaan mengalami perkembangan yang sangat cepat dan berbeda-beda arah pengembangannya. Untuk itu perlu diarahkan supaya merata dan menyeluruh di kawasan perkotaan dan kawasan sekitarnya. Untuk dapat mewujudkan ruang yang aman, nyaman dan berkelanjutan, hal tersebut dapat diwujudkan dengan rencana tata ruang yang baik (Fajar Hari Mardiansyah, 2020).

Seiring perkembangan dan pertumbuhan wilayah Kabupaten Bima serta pemanfaatan ruang yang tidak terkendali sehingga terbentuk pusat-pusat pertumbuhan baru yang tersebar diberbagai wilayah kabupaten. Dalam rangka mendorong percepatan pengembangan kawasan tersebut, mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, dan mendorong pertumbuhan daerah yang masih tertinggal (Fariz Primadi Hirsan, 2019) Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Bima 2006-2025, Wawo ditetapkan sebagai PKL (Pusat kegiatan Lokal) dan terdapat kawasan dalam kecamatan ini yang ditetapkan sebagai KSK (Kws. Strategis Kabupaten) (Bima, 2007). Kawasan yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), memiliki peran sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan disekitarnya. Akan tetapi, hingga saat ini, belum adanya dokumen/arahan yang secara jelas mengatur terkait delineasi/batasan area, kawasan perkotaan kecamatan, sebagai rujukan dalam pengembangan kawasan perkotaan di Kecamatan Wawo dimasa yang akan datang.

Melihat aktivitas masyarakat yang cukup padat, serta pengembangan potensi dari kecamatan Wawo semakin tinggi, serta posisi yang strategis mengingat kecamatan ini merupakan area lintasan jalur utama pulau Sumbawa, sebagai jalur arteri primer lintas nasional, maka dibutuhkan pengaturan terhadap kecamatan ini terutama penetapan delineasi kawasan perkotaannya. Pemerintah lokal tingkat kecamatan bahkan pemerintah daerah sendiri, belum memiliki suatu acuan dalam penetapan kawasan perkotaan yang ada di kecamatan ini. Penentuan batas wilayah sebagai entitas kota sangat diperlukan untuk menghindari keterbatasan dalam penentuan fasilitas pendukung dalam upaya pengembangan wilayah (Nur, 2019). Oleh karena itu, maka perlu adanya kepastian ruang terkait sejauh mana jangkauan yang menjadi batas fungsional perkotaan, dalam hal ini

perkotaan ibukota kecamatan dalam kaitannya sebagai kawasan inti perkotaan.

Pemberdayaan masyarakat secara partisipatif merupakan strategi yang menjadi pusat perhatian dalam pembangunan karena kegagalan pembangunan seringkali terkait dengan kurangnya partisipasi masyarakat (Marzuki, 2017). Dalam pemberdayaan yang dilakukan, salah satu program melibatkan masyarakat dalam setiap aspek kegiatan adalah pemetaan partisipatif. Dalam kegiatan yang melibatkan masyarakat ini, pemetaan partisipatif, merupakan salah satu bentuk tujuan dalam melakukan percepatan dalam pemetaan seluruh wilayah di Indonesia. Ketersediaan peta yang lengkap untuk seluruh wilayah Indonesia memerlukan waktu yang cukup panjang dengan mengandalkan pemetaan yang dilakukan oleh pemerintah baik (Mujiati, 2015). Implementasi kegiatan dari pemetaan partisipatif dengan pemanfaatan metodologi dan teknologi informasi kebumih dan pemetaan untuk melibatkan kelompok masyarakat dalam proses identifikasi masalah, penentuan prioritas, dan pengusulan program (Aditya, 2009). Salah satu output yang dihasilkan dalam pemetaan partisipatif adalah penegasan batas administrasi wilayah maupun penentuan peta-peta tematik lainnya. Kebutuhan akan adanya batas administrasi wilayah yang definitif jelas menjadi semakin penting seiring dengan pesatnya pengembangan wilayah dan pertumbuhan investasi terutama di kawasan perkotaan yang ditetapkan (Baharuddin, 2020).

Kegiatan Pemetaan Partisipatif (*Participatory Mapping*) ini, melibatkan seluruh elemen perwakilan desa serta pihak kecamatan. Untuk pencapaian hasil yang tepat sasaran, pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, beberapa alternatif solusi yang akan ditawarkan kepada mitra, yang tidak membebani kegiatan mitra dan berdampak positif bagi masyarakat secara luas. Alternatif solusi tersebut berupa kegiatan bagi elemen masyarakat di tiap desa yang akan diarahkan untuk melakukan kesepakatan bersama dalam penentuan pusat-pusat pertumbuhan di desa masing-masing yang akan berimplikasi pada pusat layanan di tiap desa, menentukan status lahan di tiap desa, dan diarahkan pada partisipasinya memperbaharui jalur aksesibilitas di tiap desa serta menentukan penamaan wilayah-wilayah desa secara lokal, sebagai bentuk pembaharuan toponimi dalam upaya penentuan deliniasi perkotaan yang tepat. Hasil dari pemetaan partisipatif yang dilakukan, akan dijadikan sebagai acuan dasar dalam penataan ruang berdasarkan potensi yang ada, khususnya di wilayah perkotaan yang akan ditetapkan, sehingga dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayahnya sendiri, masyarakat dapat terlibat secara langsung (Hepi Hapsari, 2014).

Tujuan dari dilakukannya pengabdian ini adalah, bagaimana masyarakat dan pranata kelembagaan yang ada di Kecamatan Wawo, memiliki andil dalam menentukan, batasan wilayah perkotaan di kecamatannya, serta diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan

pemahaman masyarakat dalam pengelolaan dan perencanaan kawasan perkotaan di wilayahnya sendiri dimuali dengan kegiatan partisipatif pemetaan wilayah.

B. METODE PELAKSANAAN

Pemetaan partisipatif merupakan pendekatan yang memadukan teknologi pemetaan modern dengan pendekatan partisipatif. Pendekatan ini mampu menggali pengetahuan keruangan (*spatial*) dari masyarakat setempat karena masyarakat setempat pada dasarnya adalah ahli yang memiliki pengetahuan lingkungan tempat tinggalnya. Peta yang dihasilkan oleh masyarakat setempat menggambarkan tempat mereka tinggal, memperlihatkan tempat-tempat yang oleh masyarakat dianggap penting seperti misalnya batas wilayah tertentu, pengelolaan sumber daya alam tradisional, daerah sakral, dan sederet tempat penting lainnya (Rasyid Ridha, 2019). Tahapan dan metode yang dalam pemetaan partisipatif, menggunakan pendekatan *Participation Rural Appraisal* (PRA), yaitu dengan pendekatan dasar SHIP (Sistemik, Holistik, Indisipliner dan Partisipatif), dengan tujuan menjamin optimalnya kegiatan dan efisiensi sumberdaya yang disiapkan, ditetapkan (Ni Made Eka Mahadewi, 2020)

Pada akhir kegiatan, dilakukan evaluasi dengan menyebarkan angket kepada peserta kegiatan, berupa angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan menilai, prosentase keberhasilan pemahaman terhadap kegiatan yang dilakukan. Pertanyaan dalam angket yang diisi oleh peserta, berupa pertanyaan seputar pengetahuan dasar terkait perkotaan, kemudahan pelaksanaan kegiatan, potensi dari wilayah yang diwakilkan, perbedaan kota dan desa dan pertanyaan lain yang terkait. Semakin tinggi nilai prosentase dalam tiap pertanyaan, maka dianggap pemahaman peserta kegiatan semakin baik.

Mitra yang terlibat, sebanyak 30 orang, terdiri dari seluruh perangkat pemerintahan lokal, baik di tingkat desa yang ada di kecamatan Wawo, maupun perangkat pemerintah tingkat kecamatan, seperti Perangkat Pemerintah Administrasi Kecamatan, Babinsa, Babinpolmas, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Kecamatan Wawo, seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Pendukung Kegiatan Pengabdian

No	Perwakilan	Jabatan	Jumlah
1	Kecamatan	Camat	1
2	Kecamatan	Sekcam	1
3	Kecamatan	Kepala Urusan	3
4	TNI	Babinsa	1
5	POLRI	Babinpolkantibmas	1
6	Perwakilan 9 Desa	Kades dan Sekdes	18
7	LSM Lokal	Tokoh Masy., Agama & Pemuda	5

Selama kegiatan pengabdian yang dilakukan, mitra membantu tim pengabdian dalam kegiatan antara lain :

1. Pendampingan Dalam Proses Observasi Lapangan.
2. Penyediaan Lokasi Sosialisasi & Pemetaan Partisipatif.
3. Penyediaan Instrumen Kegiatan Pemetaan Partisipatif.
4. Melakukan bantuan koordinasi Dengan Bidang Administrasi Pemerintahan & Beberapa Dinas Terkait Di Lingkup Pemkab. Bima.
5. Melakukan bantuan pelaksanaan sosialisasi pada masyarakat luas pasca kegiatan.

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penyampaian Gagasan

Penyampaian gagasan sosialisasi dan simulasi metode pemetaan berbasis partisipasi masyarakat, kepada seluruh Kepala Desa yang ada di wilayah Kecamatan Wawo. Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui tanggapan awal pejabat pemerintahan local setempat terkait kegiatan yang akan dilakukan, sekaligus dilakukan observasi awal terkait wilayah Kecamatan Wawo, untuk mendapatkan gambaran awal mengenai pendelineasian kawasan perkotaan di kecamatan ini.

2. Sosialisasi

Kegiatan dalam tahapan kedua ini digunakan untuk menyampaikan pemahaman tentang metode dan pentingnya penentuan delineasi kawasan fungsional. Penggunaan metode ceramah dikombinasikan tentang pemahaman tentang metode dan pentingnya penentuan delineasi kawasan fungsional secara 1 arah.

3. Demonstrasi

Metode demonstrasi dilakukan dengan harapan peserta dapat melaksanakan simulasi bagaimana menentukan delineasi fungsional perkotaan, delineasi pengembangan wisata, dengan melakukan penggambaran secara kortometrik dengan metode manual

4. Penyepakatan Hasil

Hasil akhir dari tahapan pemetaan partisipatif ini adalah, seluruh peserta menyepakati bersama hasil dari kegiatan yang dilakukan, dituangkan dalam berita acara, sebagai salah satu dasar penentuan delineasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahapan Kegiatan Yang Dilakukan

- a. Penyampaian Gagasan dan Observasi

Di tahap ini, tim beserta mitra menyepakati hal-hal yang akan dilakukan, maupun instrument apa saja yang akan diberikan dalam tahapan kegiatan lanjutan yang dilakukan. Dalam tahap awal ini,

mitra memberikan keleluasaan tim pengabdian kepada masyarakat UMMAT, dalam menentukan metode yang akan dilakukan. Pelaksanaan observasi dilakukan bersama perangkat pemerintah kecamatan, dengan mengunjungi dan melakukan survey lapangan, seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Penyampaian Gagasan & Observasi

b. Sosialisasi

Menindaklanjuti kesepakatan awal yang telah ditetapkan sebelumnya, dilakukan kegiatan sosialisasi dengan metode ceramah. Metode ini dilakukan dengan cara penyampaian materi terkait muatan kegiatan pengabdian, dilakukan di aula kantor kecamatan, seperti yang terlihat pada Gambar 2. Pendekatan dengan metode ceramah ini digunakan untuk menyampaikan pentingnya kegiatan penetapan delineasi kawasan perkotaan. Kegiatan ini dilaksanakan bertempat di Aula Kantor Camat Wawo - Kab. Bima, dimana para pelaku kegiatan, terutama tim pengabdian kepada masyarakat, memanfaatkan materi tayang dan alat pendukungnya, dimana materi tayang yang ditampilkan dilengkapi dengan gambar-gambar, termasuk penayangan gambaran metode pemetaan dan langkah-langkah dilakukannya peran serta masyarakat dalam pemetaan delineasi perkotaan di kegiatan ini, seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Pelaksanaan Sosialisasi

c. Demonstrasi

Pemetaan partisipatif merupakan salah satu metode yang mengintegrasikan pendekatan partisipatif untuk memecahkan masalah dalam suatu komunitas dengan melakukan diskusi. Masyarakat dilibatkan dalam merencanakan dan memutuskan

dalam pengambilan keputusan (Permatasari, 2019). Metode demonstrasi digunakan untuk menunjukkan suatu proses kerja sehingga dapat memberikan kemudahan bagi peserta sosialisasi (Naning Margasari, 2009). Demonstrasi dilakukan oleh tim pengabdian sebagai narasumber, seperti yang terlihat pada Gambar 3. Kegiatan tersebut dilakukan pada hari yang sama dengan kegiatan sosialisasi, yang diselenggarakan pada sesi siang hari. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan seluruh peserta yang telah diundang oleh pihak mitra, dengan melibatkan peserta, dan menyertakan lembaran-lembaran peta yang akan dilakukan demonstrasi pemetaan secara partisipatif, seperti terlihat pada Gambar 3.



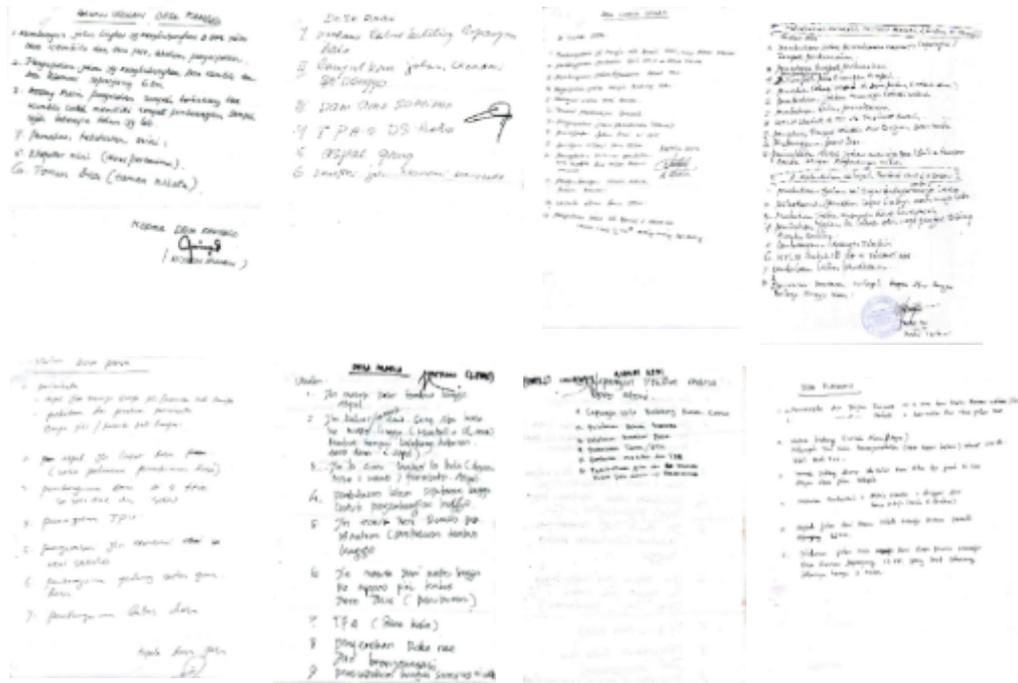
Gambar 3. Pelaksanaan Demonstrasi *Participatory Mapping*

d. Penyepakatan Hasil

Penyepakatan ini dilakukan dengan menyusun berita acara manual, secara otentifikasi tulis tangan oleh seluruh peserta yang dalam hal ini diwakili oleh seluruh kepala desa yang ada di Kecamatan Wawo. Pasca tahap penyepakatan hasil, kegiatan lanjutan yang akan dilaksanakan setelah ini adalah:

- 1) Koordinasi hasil dengan Bidang administrasi pemerintahan & beberapa dinas terkait di lingkup Pemkab. Bima,
- 2) Menyusun Peta Batas perkotaan dan pedesaan di Kecamatan Wawo,
- 3) Mencetak Produk terstandarisasi berupa Peta Delineasi Perkotaan Wawo, sebagai rujukan pembangunan di Kecamatan Wawo.

Kegiatan lanjutan ini, akan dilaksanakan oleh pihak pemerintah Kecamatan yang akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan pihak pemerintah daerah kabupaten, terkait adanya penyepakatan hasil yang telah dirumuskan dalam kegiatan pengabdian ini. Dalam Gambar 4, dapat dilihat, contoh lembar kesepakatan yang ditandatangani oleh perwakilan desa yang terlingkup di dalam Kecamatan Wawo. Lembar kesepakatan tersebut, berisikan, hasil penyepakatan batas antar desa bersebelahan, kesepakatan batas fisik kawasan serta kesepakatan terkait persetujuan penetapan delineasi perkotaan di Kecamatan Wawo, seperti terlihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Dokumentasi Hasil Berita Acara Otentifikasi, yang dilakukan oleh semua Kepala Desa

2. Hasil Kegiatan

Batas delineasi Perkotaan dan Pengembangan kawasan pariwisata dapat diidentifikasi berdasarkan kesamaan fungsi kawasan atau skala pelayanan (batas fungsional) atau berdasarkan kesamaan administrasi (batas administratif). Dasar kriteria yang dapat digunakan dalam penentuan wilayah delineasi tersebut, dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, diantaranya berdasarkan (ATR/BPN, 2019):

- a. Fungsi Pelayanan Kawasan.
- b. Fungsi Peruntukan Kawasan.
- c. Radius Jangkauan Pelayanan Pelayanan Umum.
- d. Luas Kawasan.
- e. Batasan Fisik Kawasan.

Tim pengabdian masyarakat, membuat simulasi delineasi kawasan perkotaan, berdasarkan masukan, kesepakatan dan analisa fisik kawasan, yang dilakukan langsung pada lokais kegiatan, menggunakan perangkat lunak pemetaan digital yang dilengkapi juga dengan penampakan gambar foto udara kecamatan Wawo, seperti terlihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Delineasi Kawasan Perkotaan

Penentuan Delineasi didasarkan pada:

- a. Wilayah yang sesuai dengan kriteria Kaw. Strategis Sudut Kepentingan Sosial Budaya.
- b. Batasan Fisik (jalan, sungai, saluran pematusan).
- c. Aktivitas fungsional pemanfaatan ruang.

Penentuan itu ditetapkan atas pertimbangan umum dan khusus antara lain:

- a. Umum
 - 1) Morfologi wilayah perencanaan.
 - 2) Keserasian dan keterpaduan fungsi Kaw. Strategis Sudut Kepentingan Sosial Budaya.
 - 3) Jangkauan dan batasan pelayanan untuk keseluruhan wilayah Kaw. Strategis Sudut Kepentingan Sosial Budaya yang memperhatikan RTRW.
- b. Khusus
 - 1) Kesamaan Pemanfaatan lahan dominan serta termasuk cakupan Kaw. Strategis Sudut Kepentingan Sosial Budaya.
 - 2) Keterbatasan dalam pengembangan fungsi kota.
 - 3) Delineasi wilayah administratif dan fisik.

3. Monitoring & Evaluasi

Berdasarkan hasil kegiatan pemetaan partisipatif yang dilakukan dan berdasarkan kesepakatan seluruh unsur perangkat pemerintah kecamatan dan unsur pemerintahan desa, maka delineasi yang telah ditetapkan dan disepakati bersama meliputi 8 (delapan) wilayah desa yaitu:

- a. Sebagian Desa Tarwali
- b. Sebagian Desa Pesa

Tabel 2. Evaluasi Kegiatan Pemetaan Partisipatif

No	Pertanyaan	Jawaban Peserta			
1	Apakah sdr/i, mengetahui perbedaan ciri kawasan kota dan kawasan perbedaan	Sangat Tahu (20%)	Tahu (30%)	Kurang Tahu (37%)	Tidak Tahu (13%)
2	Sejauh mana pemahaman sdr/i dengan metode pemetaan ini?	Sangat paham (23%)	Paham (57%)	Kurang Paham (13%)	Tidak Paham (7%)
3	Efektifkan metode pemetaan yang dilakukan ini	Sangat efektif (63%)	Efektif (30%)	Kurang efektif (7%)	Tidak efektif (0%)
4	Apakah wilayah sdr/i, memungkinkan di tetapkan sebagai batas kota	Sangat memungkinkan (60%)	Memungkinkan (30%)	Kurang memungkinkan (3%)	Mustahil (7%)
5	Potensi apa yang sangat menonjol di wilayah sdr/i utk dikembangkan menjadi kota	Pariwisata (30%)	SDA (29%)	Lingk. Binaan (43%)	Ekonomi (75)
6	Menurut sdr/i, kriteria apa yang memungkinkan menjadi batasan antara perkotaan dan pedesaan	Batas Fisik (jalan, sungai, saluran dll) (37%)	Batas Fungsi area (13%)	Batas keterbatasan alam, (gunung, jurang dll) (33%)	Batas kepemilikan tanah (17%)
7	Apakah dengan melakukan pemetaan batas secara bersama dan bersepakat ini, berdampak pada timbulnya konflik?	Tidak (67%)	Iya (7%)	Ragu (13%)	Tidak Tahu (13%)
8	Jika sebagian wilayah sdr/i, ditetapkan sebagai kawasan perkotaan, hal apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah	Peningkatan Infrastruktur Jalan (43%)	Peningkatan Sumber daya Manusia (23%)	Peningkatan Dana Desa (20%)	Sosialisasi Oleh Pemerintah pada masyarakat (13%)

Berdasarkan hasil angket yang diberikan, diperoleh hasil tingkat pemahaman masyarakat yang cukup tinggi, dengan rata-rata prosentase pemahaman mencapai 78,25%, terkait metode yang dilakukan dalam pemetaan partisipatif. Selain itu masyarakat sudah mampu untuk mengidentifikasi potensi dari wilayahnya masing-masing, dan mengetahui dampak yang akan terjadi dengan penetapan wilayahnya menjadi kawasan perkotaan. Secara umum, masyarakat yang diwakilkan oleh perangkat pemerintah lokalnya, menginginkan adanya peningkatan standar infrastruktur jika kawasan mereka ditetapkan dan masuk dalam deliniasi kawasan perkotaan.

4. Kendala yang Dihadapi dalam Kegiatan

Dalam kegiatan pemetaan partisipatif yang dilakukan, perangkat pemerintah lokal yang menjadi representasi perwakilan masyarakat, masih cenderung memberikan argumentasi yang cenderung menonjolkan kewilayahan secara administratif. Sedangkan dalam penetapan deliniasi perkotaan sesuai pedoman yang berlaku, yang difokuskan adalah sejauh

mana dampak pembangunan secara fungsional ciri kota yang terbentuk dan terprediksi pada masa yang akan datang.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pemetaan partisipatif merupakan metode yang memberikan kewenangan secara lebih luas kepada masyarakat, dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka atas potensi lahan dan sumber daya alam di wilayah mereka sendiri. Tahapan kegiatan yang dilakukan dapat dilakukan sesuai dengan harapan yang diinginkan dengan menghasilkan delineasi batas wilayah perkotaan yang disepakati bersama oleh semua pihak, berdasarkan parameter-parameter yang ditentukan berdasarkan regulasi yang berlaku. Tingkat pemahaman masyarakat cukup tinggi, dilihat dari prosentase pemahaman masyarakat mencapai total 80%. Untuk tingkat keefektifan metode, mayoritas masyarakat mengakui metode yang digunakan (dalam rentang efektif), termasuk dalam pendekatan yang efektif, dengan prosentase mencapai 93%. Sedangkan untuk penilaian potensi, didasarkan pada karakteristik sebaran masing-masing wilayah.

Untuk tindak lanjut yang perlu dilakukan, khususnya bagi pemerintah, adalah segera menetapkan suatu legalitas hukum berupa dokumen keputusan Bupati dapat berupa Perbup dll, sebagai dasar penetapan kawasan perkotaan di Kecamatan Wawo. Dalam sudut pandang akademik, kegiatan penelitian maupun pengabdian di kawasan Kecamatan Wawo dapat dilakukan kegiatan lanjutan, terkait pengelolaan dan pembagian zona-zona peruntukan lahan sesuai dengan kriteria tata guna lahan perkotaan, serta mengakomodir pengembangan zona budaya, pada permukiman tradisional *Uma Lengge* yang terdapat di wilayah ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, yang mengakomodasi kegiatan yang kami lakukan, dan ucapan yang sama kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Wawo, yang sangat terbuka menerima kegiatan ini, mulai dari tahap awal kegiatan hingga diselesaikannya kegiatan di tahap akhir. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada LPPM Univ. Muhammadiyah Mataram, yang mendukung kegiatan pengabdian ini, baik dalam kaitannya dengan pengurusan administrasi responsi persuratan dan izin pengabdian yang diberikan. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat secara luas bagi seluruh pihak.

DAFTAR RUJUKAN

Aditya, T. (2009, Agustus). Perencanaan dan Penyelesaian Masalah Infrastruktur Perkotaan Melalui Integrasi SIG Kolaboratif & SIG Partisipasi Publik. *Jurnal Ilmiah Geomatika*, Vol. 15(1), 1-20.

- ATR/BPN, P. K. (2019). *Modul Diklat Penyusunan RDTR Tk. Dasar : Konsep dasar RDTR & Peraturan Zonasi*. Bogor: Kementerian ATR/BPN.
- Baharuddin, A. R. (2020, Juni). Pemetaan Partisipatif Untuk Percepatan Pembangunan Desa Dan Kawasan Di Desa Tambak Sarinah, Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut. *Aquana - Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1(2)*, 52-60.
- Bima, S. D. (2007). *Perda No. 11, Tahun 2007, tentang RTRW Kabupaten Bima 2006-2025*. Raba: Bagian Hukum, Setda Kab. Bima.
- Fajar Hari Mardiansyah, P. R. (2020, Oktober). Perkembangan Kawasan Perkotaan Kecil di Pinggiran Kota Pekalongan. *Jurnal Geografi GEA, Vol. 20(2)*, 151-168.
- Fariz Primadi Hirsan, I. R. (2019, Februari). Kajian Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Bima. *Plano Earth, Vol. 4(1)*, 31-42.
- Fariz Primadi, L. J. (2019). Kajian Kecenderungan Perkembangan Kawasan Permukiman Pada Wilayah Peri Urban Kota Mataram. *Seminar Nasional ASPI 2019* (hal. 45-52). Pontianak: Jurusan Perencanaan Wilayah & Kota, Univ. Tanjung Pura.
- Hepi Hapsari, A. B. (2014, Agustus). Pemetaan Partisipatif Potensi Desa (Studi Kasus Ds. Selopak, Kec. Trawas, Kab. Mohokerto). *GEOID, Vol. 10(1)*, 99-103.
- Makkelo, I. D. (2017, Oktober). Sejarah Perkotaan : Sebuah Tinjauan Histografis & Tematis. *Lensa Budaya, Vol. 12(2)*, 83-101.
- Marzuki, K. (2017). Model Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan Melalui Program Bank Sampah Pelita Harapan Kota Makassar. *Seminar Nasional ; Research and Community Service Institute* (hal. 590-600). Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Mujiati. (2015, Mei). Peta P4T Hasil Pemetaan Partisipatif Sebagai Instrumen Identifikasi Tanah Absentee. *Bhumi, Vol. 1(1)*, 59-68.
- Naning Margasari, M. A. (2009). *Pendampingan Dalam Pengembangan Media Pembelajaran Sebagai Salah Satu Upaya Untuk Memperoleh Sertifikasi Bagi Guru-guru SMK YPKK I Sleman Yogyakarta*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial & Ekonomi, Univ. Negeri Yogyakarta.
- Ni Made Eka Mahadewi, N. K. (2020, September). Pembangunan Destinasi Pariwisata Yang Berkelanjutan Melalui Penerapan Nilai-nilai Ergonomi. *Jurnal Kepariwisata, Vol. 19(2)*, 107-115.
- Nur, D. S. (2019, Agustus). Kajian Delienasi Kota Mamuju. *Urban Planning and Property Development Review, Vol. 2(1)*, 54-71.
- Permatasari, A. L. (2019). Pemetaan Partisipatif Untuk Pengembangan Pariwisata di Desa Pandowoharjo Kabupaten Sleman. *Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat 2019* (hal. 13-18). Yogyakarta: Universitas Amikom.
- Rasyid Ridha, A. K. (2019, Februari). Metode Penyelesaian Sengketa Batas Desa UPT Tambak Sari Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. *Plano Earth, Vol. 4(1)*, 43-51.